

Tingkatkan Kerja Sama dalam Olahraga, Ade Yasin Datangi KONI Pusat

BOGOR (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin melakukan kunjungan kerja ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, kemarin.

Kunjungan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama antara Pemkab Bogor dengan KONI Pusat berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan even keolahragaan di Kabupaten Bogor, guna mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor Sport and Tourism.

Untuk diketahui, saat melakukan kunjungan kerja ke KONI Pusat, Bupati Bogor, Ade Yasin didampingi Dispora Kabupaten Bogor, KONI Kabupaten Bogor, dan Komite Pembangunan Percepatan Strategis Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan, kunjungan kerja dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama berkaitan dengan event-event keolahragaan, mengingat Kabupaten Bogor memiliki tagline "Sport and Tourism". Di Indonesia hanya dua daerah yang memiliki tagline "Sport and Tourism" yakni Kabupaten Bogor dan Palembang. Tagline itu dapat mendukung peningkatan prestasi olahraga di Indonesia, katanya.

"Banyak program-program KONI Pusat khususnya event keolahragaan baik single event maupun multi event. Melalui kerjasama ini diharapkan KONI Pusat bisa didorong untuk melaksanakannya di Kabupaten Bogor, terlebih Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan Jakarta yang jaraknya dekat,"

ungkap Bupati.

Bupati mengatakan, pihak KONI Pusat menyambut baik rencana kerjasama yang akan dilakukan antara Pemkab Bogor dengan KONI Pusat. Selain dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi, juga dapat meningkatkan potensi dan prestasi olahraga.

"Alhamdulillah kita diterima dengan baik, responnya juga baik. Mereka akan kunjungan balik ke Bogor untuk melihat potensi mana saja yang bisa dikerjasamakan, semoga kerjasama ini berjalan dengan lancar," tegas Ade Yasin.

Selanjutnya, Ketua KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menuturkan, pihaknya akan melakukan kunjungan balik ke Kabupaten Bogor untuk meninjau lahan dan sarana prasarana yang ada di sekitar Stadion Pakansari.

"Kita ingin pastikan lahan di sana cocok untuk dibangun apa. Jangan sampai dibangun sarana prasarana dengan biaya tinggi namun jarang digunakan," tegasnya.

Menurutnya, mengenai event olahraga yang akan dilaksanakan di wilayah, selalu diawali dengan peninjauan untuk memastikan kesiapan segala sesuatu.

"Setiap kita akan melaksanakan event olahraga kita selalu meninjau kesiapan segala sesuatu, termasuk mencari event organizer olahraga, agar ada event di Bogor," tukasnya. ● **gio**

12 Bangunan di Jalan Pajajaran Lampaui Batas Geometri Jalan

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengizinkan pemilik 12 bangunan di jalan Raya Pajajaran yang bagian depan bangunannya melampaui batas geometri jalan. Bangunan harus dimundurkan 1,5 m hingga 3 m sampai batas sebelum drainase di tepi jalan.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, di Balai Kota Bogor, Rabu (21/4), mengatakan ke-12 bangunan yang bagian depan bangunannya melampaui batas geometri jalan itu berada antara simpang Warung Jambu hingga Simpang Lippo Kebun Raya. Menurut Dedie, pembongkaran bagian depan bangunan untuk penyaluran batas geometri jalan itu mendesak dilakukan tahun 2021 ini, karena Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) saat ini sedang membangun pedestrian jalan di lokasi tersebut sepanjang 3 km.

"Pembangunan pedestrian ini mengalami kendala," katanya.

Dedie menjelaskan, sosialisasi terhadap pemilik 12 bangunan tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak 2019, tapi karena pada 2020 ada refocusing dana dari alokasi anggaran infrastruktur sehingga belum bisa dikerjakan. "Penyaluran batas

geometri jalan ini tujuannya untuk pelebaran ruas jalan Raya Pajajaran sehingga manfaatnya bisa dirasakan bersama oleh semua pihak, menjadi lebih nyaman," katanya.

Menurut Dedie, Kementerian PUPR juga sedang membangun pedestrian sepanjang 3 km menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari APBN di ruas jalan tersebut, sehingga penyelesaian batas geometri jalan ini harus disegerakan. "Pembangunan pedestrian tersebut sudah dikerjakan sejak awal Februari dan batas waktunya sampai akhir Mei," katanya.

Pedestrian jalan yang sedang dibangun tersebut, akan diintegrasikan dengan jalur khusus sepeda yang juga akan dibangun oleh Pemerintah Kota Bogor. Pemkot Bogor, kata dia, telah mengingatkan pemilik 12 bangunan tersebut untuk membongkar bagian depan bangunannya paling lambat sampai akhir April ini.

Dedie menjelaskan, ke-12 pemilik bangunan tersebut sudah dipanggil dan dipresentasikan terkait rencana pemerintah pusat dan pemerintah Kota Bogor dalam membangun pelebaran jalan di ruas tersebut. "Para pemilik bangunan menyatakan bisa mengerti," katanya. ● **gio**



MASJID SERIBU TIANG JAMBI

Umah Islam membaca Al Quran di dalam Masjid Agung Al-Falah atau Masjid Seribu Tiang, Jambi, Rabu (21/4). Masjid yang diresmikan pemakaiannya pada 1980 oleh mantan Presiden Soeharto tersebut dibangun tanpa dinding dan pintu dengan 232 tiang penyangga atap dan kubah.

Pemikul Jenazah Covid-19 di TPU Cikadut Mogok Kerja

BANDUNG (IM)- Belasan pemikul jenazah Covid-19 berstatus pekerja harian lepas (PHL) di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut, Kota Bandung, melakukan mogok kerja sejak hari ini, Rabu (21/4) hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Sikap tersebut ditempuh karena hampir dua bulan mereka belum menerima gaji.

Salah seorang perwakilan pemikul jenazah Covid-19, Fajar mempertanyakan gaji yang belum cair kurang lebih hampir 2 bulan terakhir. Ia mengatakan, para pemikul jenazah Covid-19 pasca ditetapkan menjadi PHL baru sekali mendapatkan gaji dari pemerintah.

"Jadi gini, kita tuh dari sebulan kemarin mempertanyakan kepastian gajian pertanggal berapa, harus punya pegangan. Dijawab kepala UPTI, proses, proses sampai kemarin ada pertemuan masih proses kita tanya sampai kapan proses ini belum ada jawaban," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (21/4).

Dia menuturkan, pihaknya ingin kepastian terlebih dahulu terkait gaji dan baru akan kem-

bali bekerja. Saat ini pihaknya berhenti terlebih dahulu memikul jenazah Covid-19 di TPU Cikadut. "Kita minta kepastian, baru kita bekerja kembali. Kita berhenti dahulu saja sebelum dikeluarkan," katanya.

Fajar mengungkapkan, belasan pemikul jenazah Covid-19 di Bandung diangkat menjadi PHL pada Februari lalu dan mendapatkan gaji pada Maret. Namun, kurang lebih hampir dua bulan terakhir belum mendapatkan gaji. "Jadi PHL Februari, Maret menerima gaji tanggal 10. Hampir dua bulan belum," ungkapnya. Pihaknya mempertanyakan anggaran Rp 4 miliar yang digelontorkan dinas untuk gaji para pemikul jenazah selama 1 tahun.

"Yang jadi pertanyaan, anggaran Rp 4 miliar kenapa anggaran sudah ada tapi untuk keperluan fasilitas di lapangan gaji pegawai masih seperti ini ada apa," katanya. Ia mengaku hanya mendapatkan beberapa kali alat pelindungan diri.

"APD pernah beberapa kali, 2 kali abis untuk ujian, nunggu sampai kepastian dan nunggu sampai hak kita terima," katanya. ● **pur**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PERCEPATAN VAKSINASI UNTUK GURU

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada guru di Aula Serba Guna Rumah Sakit Advent, Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/4). Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Supandi menyatakan, hingga 20 April 2021 vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidikan di Jawa Barat telah mencapai 65 persen dan pihaknya terus melakukan upaya percepatan vaksinasi agar dapat menggelar sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru pada Juli 2021.

DPRD Bogor Pertanyakan Nasib Pekerja RS Lapangan

Kalau yang nakes ditarik ke RSUD, harusnya yang non-nakes juga difasilitasi. Jangan cuma dibiarkan saja. Seharusnya pegawai non-nakes juga mendapatkan fasilitas yang sama, kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri.

BOGOR (IM)- Sejak Senin (19/4), operasional Rumah Sakit Lapangan Kota Bogor sudah resmi diberhentikan. Namun, nasib dari para karyawan yang sempat bekerja di RS Lapangan Kota Bogor menjadi pertanyaan bagi anggota DPRD Kota Bogor.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan nasib pegawai non tenaga kesehatan (nakes) di RS Lapangan Kota Bogor. Di mana, diketahui beberapa pegawai nakes ditarik

ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Menurutnya, seharusnya pegawai non-nakes juga mendapatkan fasilitas yang sama.

"Kalau yang nakes ditarik ke RSUD, harusnya yang non-nakes juga difasilitasi. Jangan cuma dibiarkan saja," kata Akhmad, Rabu (21/4).

Lebih lanjut, Akhmad mengatakan, berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, kontrak minimal pekerja itu satu tahun. Sedangkan, pegawai RS Lapangan Kota

Bogor baik nakes dan non-nakes hanya dikontrak selama rumah sakit beroperasi, yaitu tiga bulan. "PKWT saja satu tahun, ini kok hanya tiga bulan, berarti kan ini penipuan terhadap masyarakat," ujarnya.

Kepala Dinas Ketemagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor, Elia Buntang angkat bicara mengenai kontrak kerja yang dilakukan RS Lapangan Kota Bogor. Dia menilai, yang diterapkan rumah sakit darurat itu berdasarkan kondisi darurat.

Sehingga, lanjutnya, RS Lapangan diperbolehkan untuk melakukan kontrak terhadap pegawainya selama tiga bulan, tergantung kebutuhan lapangan. "Kondisi RS Lapangan itu kan berbeda, mereka kan kondisinya darurat. Artinya kan berdasarkan kebutuhan lapangan dan non-formal, jadi mau sebulan atau seminggu bisa saja diberhentikan kontraknya," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Kepala RS Lapangan Kota Bogor, Yeti Hariyati, terdapat 246 pegawai yang bekerja di RS Lapangan. Dia memerinci, dari 246 orang tersebut, 119 orang di antaranya berstatus nakes dan 127 orang sisanya merupakan pegawai non-nakes.

Yeti pun membenarkan jika kontrak pegawai di RS Lapangan Kota Bogor hanya selama tiga bulan saja dan tidak diperpanjang. Sedangkan untuk nasib pegawai nakes, ada yang ditarik ke RSUD dan ada yang sudah direkrut ke rumah sakit lain. Namun, dia akan memanggil lagi nakes yang ingin kembali ke RS Lapangan Kota Bogor jika suatu saat rumah sakit darurat ini dibutuhkan kembali. "Yang direkrut 128, dari perekrutan itu ada yang relatif mulai di-hire RS lain, ada yang mungkin kalau masih menunggu bisa bekerja lagi di

sini," ujarnya.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, diberhentikannya operasional RS Lapangan Kota Bogor dikarenakan kebutuhan tempat tidur pasien Covid-19 masih mencukupi di Kota Bogor. Tak hanya itu, kontrak dari rumah sakit darurat ini juga diketahui hanya tiga bulan beroperasi sejak Januari hingga April.

"Saat ini juga kita terus berkoordinasi dengan BNPB, nah BNPB yang akan melakukan evaluasi dan asesmen secara administratif, di-review oleh inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), disampaikan nanti ke BNPB, nah BNPB akan sama-sama mengkaji. Kalau tidak ada kebutuhan maka tidak akan dilanjutkan, tetapi kita harus mengantisipasi jangan sampai ada gelombang kedua atau lonjakan lagi," kata Bima Arya. ● **gio**

Pansus DPRD Enggan Bahas Raperda Perumda Jasa Transportasi

BOGOR (IM)- Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan nama atas Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Jasa Transportasi masih belum menemukan kejelasan. Terhitung kurang lebih lima bulan berkas raperda tersebut bertahan di DPRD Kota Bogor.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda PDJT, Endah Purwanti mengatakan, pembahasan raperda tidak dilanjutkan lantaran dewan tidak setuju dengan draf yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Dia menyebut, raperda yang tadinya berubah nama dari PDJT menjadi Perumda, diganti menjadi pembentukan baru Perumda Jasa Transportasi.

"Ini sangat aneh, karena beberapa waktu lalu kami disodorkan draf baru dengan judul yang berubah, di mana judulnya menjadi Pembentukan Perumda Jasa Transportasi. Tentu saja kami tidak terima," kata Endah di Kota Bogor, kemarin.

Selain itu, Endah menjelaskan, DPRD belum menerima berkas audit keuangan. Padahal, berkas tersebut meru-

pakan syarat utama dimulainya kembali pembahasan raperda tersebut. Sehingga, pembahasan raperda mengenai PDJT masih ditahan.

Dia menyarankan, Pemkot Bogor harus menutup buku perusahaan dulu secara bersih. "Kami sudah sepakat tidak akan memulai pembahasan raperda sebelum adanya audit," ucap politikus PKS tersebut.

Guna mempercepat pengaktifan kembali PDJT, Pemkot Bogor membentuk tim restrukturisasi jajaran direksi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah. Syarifah mengatakan, pembentukan tim restrukturisasi merupakan langkah kongkret Pemkot Bogor untuk menyetahkan kembali PDJT.

"Iya tim restrukturisasi sudah dibentuk dan dipimpin oleh saya. Nanti ini akan membahas soal revolusi manajemen PDJT agar lebih baik lagi," tuturnya.

Syarifah memastikan, pihaknya masih belum membahas soal penyertaan modal pemerintah (PMP). Sebab, kasus PDJT hampir mirip dengan kasus PT Prayoga Perambangan dan Energi (PPE) di Kabupaten Bogor.

"Memang mirip dengan

PPE ya, jadi pada saat nanti memilih direksi, kuncinya itu sebenarnya pemilihan direksi. Direksi itu tidak hanya yang mempunyai kemampuan manajemen, tapi dia juga mempunyai jiwa investor dan pengembangan usaha," jelas Syarifah yang pernah menjabat kepala Bappeda Kabupaten Bogor tersebut.

Kondisi direksi PDJT mengalami kekosongan sejak 2017. Sepeninggal Direksi Utama, Krisna Kuncayho, Pemkot Bogor tidak melakukan pemilihan direksi baru. Saat itu, Pemkot Bogor malah menunjuk Kepala Dinas Perhubungan (Disub) Kota Bogor, Rachmawati merangkap sebagai direksi. Bahkan saat ini, Pemkot Bogor hanya mengandalkan pejabat sementara (pjs) dewan pengawas PDJT, Agus Suprpto.

Melihat kondisi seperti ini, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai Pemkot Bogor terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut Atang, seharusnya Pemkot Bogor menyelesaikan persoalan yang ada satu persatu. "Sekarang dibikin tim restrukturisasi. Kan pansusnya juga belum mulai pembahasan, masih menunggu hasil audit dulu," ujar Atang. ● **gio**



IDN/ANTARA

PRODUKSI MIE GLOSOR MENINGKAT

Pekerja memproduksi mie glosor di industri rumahan, jalan Pancasan Baru, Kelurahan Pasir Jaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/4). Produksi mie glosor sebagai makanan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan 1442 H ini mengalami peningkatan dibanding hari biasanya 3 ton menjadi 15 ton per hari untuk memenuhi tingginya permintaan di wilayah Bogor, Cipanas dan Cianjur.

7 Titik Penyekatan, Pemudik Masuk Bogor akan Diperiksa

BOGOR (IM) - Sebanyak tujuh titik sekat akan dilakukan di beberapa ruas jalan wilayah perbatasan di Kabupaten Bogor. Hal itu untuk mengantisipasi pemudik masuk atau keluar Bogor. Penyekatan jalan akan dimulai pada 6 hingga 17 Mei di mana diberlakukan kebijakan larangan mudik pada Lebaran 2021.

Kapolres Bogor, AKBP Harun mengatakan, titik penyekatan akan dilakukan di wilayah terluar atau perbatasan wilayah Kab. Bogor dengan Kota Bogor, Cianjur, Sukabumi, Depok, Bekasi, Jakarta, dan Tangerang.

Tujuh di antaranya ruas jalan akan ditempatkan posko jaga di Cibinong, Gileungsi, Puncak, Cigombong, Parung, Cigombong, dan Jasinga. "Titik-titik tersebut nantinya akan ditambah. Kita lihat kebutuhan, 7 titik sekat itu ruas jalan dengan volume kendaraan yang paling tinggi," kata Harun, Rabu (21/4).

Harun menjelaskan, ada dua metode yang akan diterapkan pada pola pengawasan nantinya.

Pola pertama bagi masyarakat di wilayah Jadetabek dan kedua orang yang di luar Jadetabek yang akan masuk Bogor.

Bagi pemudik wilayah Jabodetabek yang diperbolehkan melakukan perjalanan pendek akan dilakukan pemeriksaan sertifikat vaksin dan surat keterangan negatif antigen. "Pola pertama bagi pemudik lokal atau Jabodetabek akan diperiksa sertifikat vaksin dan surat negatif antigen," jelasnya.

Sedangkan pola kedua bagi pemudik di luar Jabodetabek yang sama sekali tidak diperkenankan melakukan perjalanan maka akan langsung diminta putar balik. "Kita lihat dari pelat kendaraan, juga pemeriksaan KTP. Bila diketahui ingin mudik, kita langsung putar balik," tambahnya.

Kendaraan-kendaraan yang masih diperkenankan melakukan perjalanan jauh hanya bagi kendaraan pengangkut bahan pangan, BBM, kedurawatan, dan kendaraan angkutan barang tidak berpenumpang. ● **gio**

Baznas Kabupaten Bogor Bagikan 13.000 Paket Bantuan Sosial

CIBINONG (IM)- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bogor akan membagikan 13.000 paket bantuan sosial berupa sembilan bahan pokok (Sembako), sarung dan uang yang nilai paket tersebut sebesar Rp 500.000.

"Ke-13.000 paket bantuan sosial tersebut akan kami berikan kepada anak yatim, fakir miskin, kyai salafi, guru ngaji, amil, marbot dan guru Agama Islam," kata Ketua Baznas Kabupaten Bogor, KH Lesmana kepada wartawan, Rabu (21/4).

Dia menerangkan agar pembagian paket itu memenuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid 19, maka jajarannya akan menyalurkan paket bantuan sosial tersebut ke wilayah-wilayah.

"Kami tak bisa mengumpulkan 13.000 orang penerima paket bantuan sosial hingga pembagiannya akan diatur dengan cara langsung disalurkan ke rumah mereka. Selain itu karena pandemi Covid 19 jumlah paket bantuan sosial ini juga berkurang dari 32.000 paket menjadi 13.000," terangnya.

KH. Lesmana menuturkan khusus kepada marbot, pada malam peringatan Nuzulul Quran (Awal turunnya ayat suci Alquran) yaitu pada 17 Ramadan 1442 Hijriyah, paket bantuan sosial secara simbolik akan diberikan kepada mereka.

"Paket bantuan sosial untuk 1.000 marbot kami akan akan dibagikan pada malam peringatan Nuzulul Quran, data marbot akan diusulkan oleh Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)," tutur KH. Lesmana.

Walaupun pandemi Covid 19, target raihan zakat Baznas Kabupaten Bogor naik dari Rp 10 milyar menjadi Rp 12 milyar, hal itu berkat naiknya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas.

"Raihan zakat Baznas Kabupaten Bogor melebihi target 20 persen dari Rp 10 milyar menjadi Rp 12 milyar, zakat yang kami terima ini akan kami salurkan lagi ke anak-anak yatim untuk beasiswa pendidikan mereka hingga mereka lulus dari jenjang pendidikan SMA atau perguruan tinggi," lanjutnya. ● **gio**